



Pendidikan Kewarganegaraan

Pertemuan 9 & 10

Inayah Swasti Ratih, MSE

Pengertian Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat

kratos atau *kratein* yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah ‘kekuasaan rakyat’.



Pengertian Demokrasi

Abraham Lincoln, *Democracy is government from the people by the people and for the people.*

Kartini Kantono, “Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan”.

Sukarna, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara *normatif* (demokrasi normatif) dan *empirik* (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke 4 SM sampai abad 6 M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (direct democracy) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak sebagai prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara Kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Budiardjo: 1994: 54)



Ciri Demokrasi

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Pilar demokrasi berdasar konsep rule of law menurut A.V. Dicey sebagai berikut:



Demokrasi Presidensial

Menekan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandate secara langsung dari rakyat. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh hukum atau konstitusi.

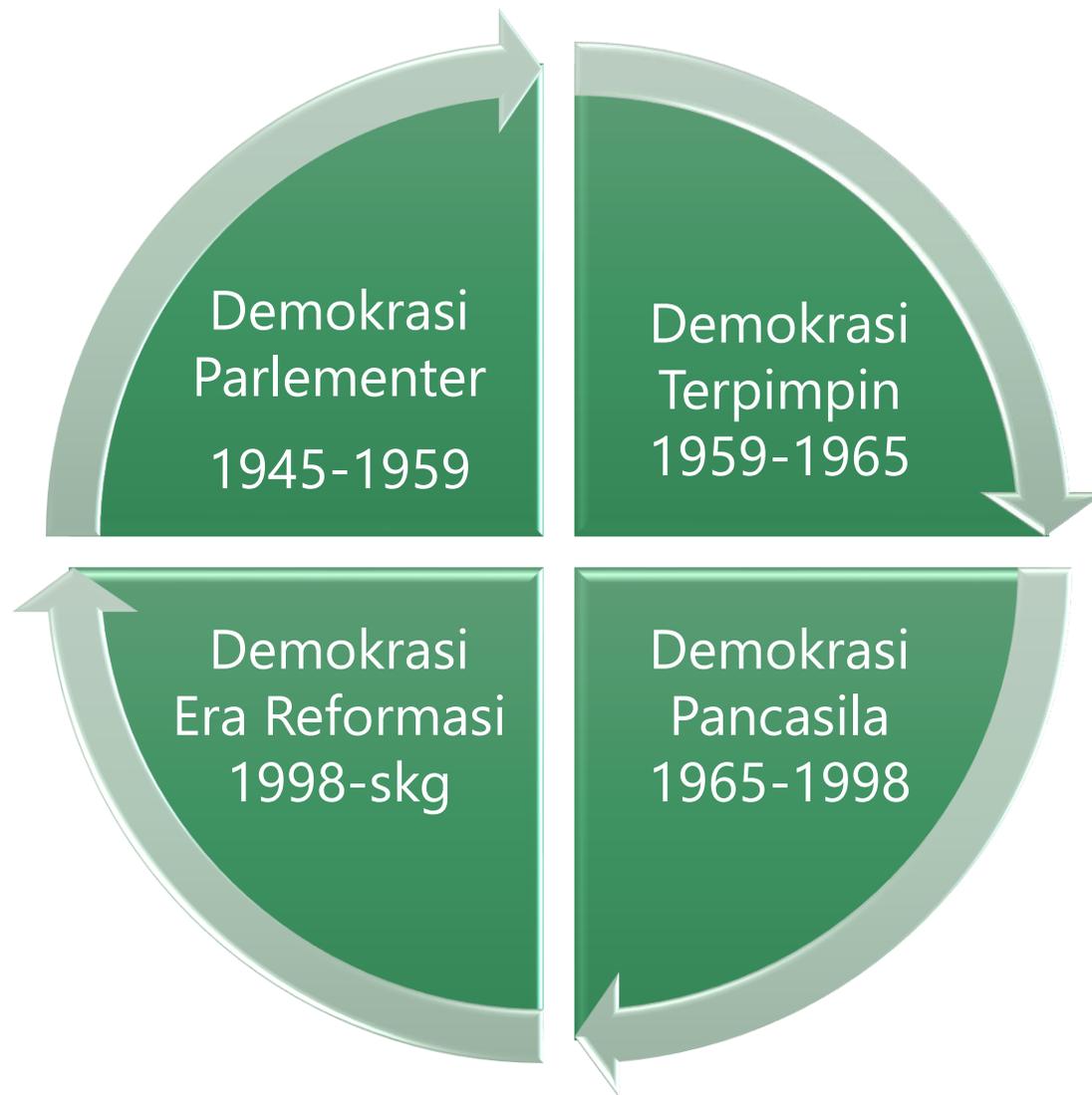
Menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislative. Parlemen adalah pemegang peran utama dalam system pemerintahan di negara-negara yang menerapkannya. Parlemen memiliki kewenangan mengangkat kepala pemerintahan serta memberhentikannya dengan mengeluarkan mosi tak percaya.

Demokrasi Parleментар

The background features a solid orange color with a pattern of lighter orange, wavy, horizontal lines. On the left side, there is a faint, stylized silhouette of a tree with a vertical trunk and several diagonal branches.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi di Indonesia



Sistem Pemerintahan di Indonesia

Dalam UUD 1945 hasil amandemen menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan secara horisontal. Masing-masing kekuasaan dan fungsi lembaga negara berkedudukan sederajat, sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances). Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif (menjalankan pemerintahan), DPR yang para anggotanya juga merupakan anggota MPR adalah pemegang kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh tiga lembaga tinggi negara yaitu MK, KY dan MA serta lembaga pemeriksa keuangan yaitu BPK.



Lalu, bagaimana Islam memandang Demokrasi ?

Diksusi By Zoom

